

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU

By: WAN FITRAH HIDAYAT
Supervisor: MUHAMMAD RIDWAN
E-mail : pro_yayat@ymail.com

ABSTRACT

Implementation of measures regarding how MUCH Its been programmed towards IT REALLY satisfying. Finally FUNDS highest abstraction level as a result of implementation of the some changes can be measured in the Yang, Yang Major issues being targeted program. FUNDS principle, policy implementation is a way in order to achieve policy goals. And no more no less, to implement a public transport policy ADA prayer So step option, which implements Jump In, Programs form or through policy formulation derivative or derivative language of public transport policy.

The research objective is to determine the initial and analyze Implementation of the Primary Affiliate Program The Family income increase implemented By Agency for Community Empowerment And Family Planning in Sub Rumbai Coastal city of Pekanbaru. Knowing the constraints Arising In, Primary Affiliate Program Implementation of Family income increase implemented By Agency for Community Empowerment and Family Planning in Sub Rumbai Coastal city of Pekanbaru.

RESULTS The study concluded that the respondents about the factors of cause of poverty in Sub Rumbai Coastal City Pekanbaru, is "GOOD ENOUGH" The response by 31 respondents (46.64%). Reason respondents said GOOD ENOUGH BECAUSE the government has tried various way to alleviate rural poverty but not optimal zero effort. In constraints, poverty alleviation Barriers encountered in Pekanbaru City Coastal District Rumbai is limited government funding for mengetaskan Number poverty in Pekanbaru city simultaneously, lack of preparation programs have to be implemented in phases Language Of The government appointed a team to undertake poverty alleviation in stages in Poor village, Team A does not address the issue of optimal poverty alleviation efforts in poverty alleviation,.

Keywords: Implementation, Primary Affiliate Program, Family Welfare Income Increase (UPPKS)

Latar Belakang Masalah

Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Sebagai suatu proses, implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Maksudnya untuk menempatkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi adalah kinerja (*performance*) yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Tanpa kondisi ekonomi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan usaha ini telah dirintis dan dipelopori oleh BKKBN yang merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha.

Untuk mengembangkan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang dimotori oleh BKKBN. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain (1) memberikan bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir, dana BUMN, Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan Kukesra Mandiri; (2) pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut, pembinaan kemitraan baik dalam hal permodalan, SDM, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran; (3) pembinaan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok ini dengan berbagai pihak; (4) pembinaan produksi agar kelompok UPPKS menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas, yang sesuai dengan permintaan pasar.

Berbagai strategi digunakan para pengusaha UPPKS untuk meningkatkan pemasaran produknya, dari mulai menciptakan produk yang dibutuhkan konsumen, memberikan harga yang sesuai dengan target pasar, memilih lokasi usaha yang strategis, serta melakukan kegiatan promosi yang mendukung peningkatan penjualan

Fenomena dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah:

1. Tingginya tingkat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru membutuhkan suatu program pemberantasan kemiskinan melalui UPPKS. Namun program yang diadakan belum efektif dalam pemberantasan kemiskinan. Program tersebut seperti pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum untuk kebutuhan masyarakat.
2. Kemiskinan yang terjadi dapat menimbulkan kan fenomena sosial yang berarah pada gangguan ketertiban masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin agar tingkat kemiskinan dapat teratasi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.
3. Perhatian pemerintah setempat dalam pemberdayaan masyarakat miskin sehingga tingkat kemiskinan di daerah tidak mengalami perubahan. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat banyak yang menganggur.

Fenomena-fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi penyebab tidak tercapainya program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana. Dengan tidak tercapainya program BPMKB secara maksimal, maka pemberdayaan masyarakat menjadi tidak optimal.

B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan yaitu:

“Mengapa Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tak terlaksana dengan baik”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

D. Studi Kepustakaan

Memerangi kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik (Tjiptoherijanto,2007: 76). Menurut Lewis, A. (dalam Suparlan, 2003: 5), memandang kemiskinan dan cirricirinya sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.(Suparlan, 2003: 4–5).

Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah

disorganisasi atau masalah kelangkaan sumber daya, melainkan di dalam beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan ke luar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Selanjutnya Lewis, mendefinisikan kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme.

Kebudayaan Kemiskinan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Kemiskinan menurut Suparlan (2003: 3), adalah suatu standard tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Kadir, (2003: 5) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Mubyarto, (2007: 159) , golongan miskin adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian balita. Menurut Salim (2004: 61), mendefinisikan golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah karena rendahnya produktifitas, di mana rendahnya tingkat produktifitas disebabkan oleh :

1. tidak memiliki asset produksi
2. lemah jasmani dan rohani.

Simanjuntak, (2003), berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, perumahan, kesehatan dengan memadai. Menurut *World Health Organization*, (*world Bank*,2005), kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada Negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatannya kurang merata.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu masyarakat, semakin kecil proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Namun perlu diingat bahwa di samping tergantung pada pendapatan perkapita, besarnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tergantung juga pada distribusi pendapatan. Semakin tidak merata

distribusi pendapatan semakin besar pula penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau semakin tinggi persentase penduduk yang miskin.

Ciri – ciri kemiskinan pada umumnya dipaparkan sebagai berikut :

- a. Salim (2004: 63.) memberikan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut :
 1. mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan)
 2. tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri.
 3. rata-rata pendidikan mereka rendah.
 4. sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah.
- b. Menurut Juoro, (2005: 8), golongan miskin yang tinggal di kota ialah mereka yang hidup di suatu perekonomian yang biasa disebut *slum*. Mereka bukanlah gelandangan karena mempunyai pekerjaan, tempat tinggal, aturan hidup bermasyarakat dan memiliki aspirasi.
- c. Menurut Tumanggor dalam Ismail (2009: 3), cirri-ciri masyarakat yang berpenghasilan rendah / miskin adalah :
 1. pekerjaan yang menjadi mata pencarian mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.
 2. nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan
 3. nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
 4. karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.

Selain ciri-ciri kemiskinan seperti tersebut di atas, kemiskinan sering juga digolongkan dalam beberapa macam kemiskinan. Di antaranya adalah ke dalam dua macam kemiskinan yaitu; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang perseorangan atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh Kebutuhan Dasar Minimum (KDM). Di sini tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau disebut sebagai Garis Kemiskinan. Perkiraan Garis Kemiskinan dengan menggunakan konsep KDM ini merupakan suatu yang statis sifatnya. Perkembangan Garis Kemiskinan biasanya disesuaikan menurut indeks kemiskinan, di mana tingkat kehidupan penduduk miskin sama sekali tidak mengalami perubahan, sementara itu golongan penduduk yang lain tingkat kehidupannya telah meningkat. Kesulitan utama dalam konsep Kemiskinan Absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja melainkan juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor lainnya.

Konsep kemiskinan relatif didasari kenyataan bahwa orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “ tidak miskin “. Sekalipun pendapatan telah mencapai tingkat

kebutuhan minimum, namun apabila pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah daripada masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih dalam keadaan miskin.

Sementara itu menurut Azhari (2007: 32), menggolongkan kemiskinan kedalam tiga macam kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan alamiah
2. Kemiskinan struktural
3. Kemiskinan kultural

Menurut *United Nation Devevelopment Programme* (UNDP) tahun 2007, pembangunan manusia baik di tingkat global , tingkat nasional maupun daerah ditekankan pada pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, Di sini pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Konsep pembangunan manusia adalah (Laporan Pembangunan Manusia , BPS 2007) : “Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif ”

Konsep pembangunan manusia ini kelihatannya sederhana akan tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang, bahkan seringkali manusia tidak lagi dianggap sebagai asset yang perlu diberdayakan melainkan dianggap sebagai beban pembangunan (Swasono, 2007).

Pada hakekatnya pembangunan manusia dan hak asasi manusia mempunyai kesamaan visi dan tujuan, (*Human Development Report 2009: 1*) yaitu untuk :

1. Kebebasan dari diskriminasi berdasarkan jender, ras, etnis, atau agama
2. Kebebasan dari kekurangan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak.
3. Kebebasan untuk berkembang dan mengembangkan potensinya.
4. Kebebasan dari rasa takut dari ancaman terhadap keselamatan diri penyiksaan, penangkapan yang sewenang – wenang dan tindakan kekerasan lainnya.
5. Kebebasan dari ketidakadilan dan penyimpangan hukum.
6. Kebebasan untuk berfikir, berbicara dan berprestasi dalam pembuatan keputusan serta berserikat.
7. Kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa eksploitasi.

Paradigma Pembangunan manusia mempunyai empat komponen (*Human Development Report 2009: 12*) yaitu :

- a. Produktifitas
- b. Pemerataan.
- c. Keberlanjutan.
- d. Pemberdayaan.

Untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan, maka dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Miskin Kota Pekanbaru, maka criteria keluarga miskin adalah:

1. Mentalitas individu yang rendah dan tidak mau terkait oleh suatu aturan yang telah ditetapkan.
2. Kepala keluarga atau anggota keluarga yang berusia produktif memiliki penghasilan Rp. 850.000,- perbulan dan tidak memiliki asset bernilai ekonomis.
3. Anggota keluarga tidak bisa makan 2 (dua) kali sehari (2100 kalori) dan 1 (satu) minggu tidak mengkonsumsi daging/ikan/telur.
4. Tidak mampu menyekolahkan anak sampai pada jenjang perguruan tinggi.
5. Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda (2-3 stel).
6. Tidak memiliki kendaraan bermotor atau transportasi sungai yang bermesin.
7. Memasak menggunakan kayu bakar.
8. Rumah di huni oleh 4 (empat) orang dengan luar kurang dari 21 meter.
9. Sumber penerangan bukan listrik.
10. Sumber air minum dari sumur/penampungan air hujan (PAH)
11. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh/nelayan.
12. Tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD).
13. Tidak mempunyai tabungan/rendahnya budaya menabung.
14. Tidak bersedia mengolah lahan yang ada.
15. Bila telah memiliki bakal 1 (satu) minggu maka istirahatnya 1 (satu) minggu, tidak berusaha mencari tambahan penghasilan untuk masa depan.
16. Terbatasnya infrastruktur.

Pembangunan manusia lebih jauh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, serta kemandirian (*self-empowerment*) secara berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, khususnya terhadap masyarakat yang memperoleh bantuan dari BPMKB Kota Pekanbaru dalam program kesejahteraan masyarakat..

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang diambil yaitu petugas pada Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas menangani masalah retribusi hotel dengan populasi sebanyak 4 orang diambil sampel sebanyak 2 responden. Pengusaha Hotel di Kota Pekanbaru sebanyak 121 orang diambil sampel sebanyak 23 responden.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu menetapkan sampel berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah responden (Purposive Random Sampling).

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan dengan responden tentang proses pajak daerah khususnya pajak hotel seperti Tujuan kebijakan, Tujuan yang ingin dicapai, Hasil Kebijakan, Keberhasilan Kebijakan
- b. Data Sekunder.
Adalah data yang penulis peroleh dari berbagai dokumen-dokumen, literatur-literatur dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner adalah daftar pertanyaan dalam bentuk tertulis yang diajukan kepada Pengusaha Hotel yang dijadikan responden dalam penelitian ini.
- b. Wawancara adalah penulis bertanya langsung kepada responden yang dianggap representatif dalam penelitian yaitu Pengusaha Hotel di Kota Pekanbaru.

7. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan responden, kemudian data yang terkumpul dikelompokkan dalam bagiannya sesuai dengan bagian data tersebut dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

Selanjutnya penulis sajikan dalam dua bentuk yaitu untuk data yang bersifat kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang lengkap dan rinci. Setelah itu data tersebut penulis analisis dan dibahas dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya dan didapat suatu kesimpulan dengan cara induktif yaitu dari yang bersifat khusus menuju ke yang umum.

F. Hasil Penelitian

Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diiringi dengan peningkatan daerah. Terdapatnya daerah atau desa yang tertinggal disebabkan berbagai faktor. Diantaranya adalah kurangnya Faktor Individu, kurangnya infratraktur pendidikan dan Kesehatan dan terjadinya masalah pemasaran hasil pertanian.

Sebagaimana yang dimaklumkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya melalui pengaturan distribusi kekayaan yang adil dengan berlandaskan pada hukum.

Oleh karena itu diharapkan setiap daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan kesejahteraan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan diwujudkan salah satunya dengan upaya pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan. Dengan kewenangan daerah yang semakin besar tersebut, maka pemerintah daerah bersama DPRD-nya memiliki tanggung jawab dan keleluasan yang cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis bagi upaya-upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya.

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengentasan kemiskinan terdiri dari data:

- Pengadaan Faktor Individu yaitu upaya dalam pengadaan infrastruktur jalan yang tidak memadai, listrik yang tidak ada dan jaringan telekomunikasi yang tidak masuk di daerah tertinggal.
- Faktor Sosial adalah upaya pemerintah dalam hal mendirikan sekolah dan puskesmas di daerah tertinggal.
- Faktor Kultural adalah usaha membina dan memasarkan hasil pertanian dimana daerah tertinggal mata pencaharian masyarakatnya adalah mayoritas petani.

Terbatasnya infrastruktur daerah menyebabkan daerah tersebut mengalami kesulitan ekonomi sebab akses untuk memasarkan hasil pencaharian hanya disekitar daerah yang mana penduduknya sama-sama berada dibawah garis kemiskinan.

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah:

- a. Faktor Individu.
- b. Faktor Sosial
- c. Faktor Kultural
- d. Faktor Struktural

Berikut akan dijelaskan dalam pembahasan per indikator berdasarkan konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Faktor Individu

Faktor Individu adalah faktor yang timbul dari diri pribadi seseorang yang menyebabkan sesuatu itu ada. Seseorang mengalami kemiskinan dapat disebabkan oleh karena diri mereka sendiri. Sehubungan dengan penyebab kemiskinan dari faktor individu, ditetapkan kriteria penelitian yaitu:

- Tingkat Keterampilan
- Tingkat Pendidikan
- Kondisi Fisik

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Faktor Individu dalam menyebabkan Kemiskinan di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Faktor Individu dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Baik	21	31,34
2.	Cukup Baik	36	53,73
3.	Kurang Baik	10	14,93
T o t a l		67	100.00

Sumber : Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 1, tanggapan responden tentang Faktor Individu dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai cukup baik sebanyak 36 responden (53,73%) menyatakan hal tersebut. Alasan responden menyatakan cukup baik karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 2 yang memenuhi kriteria sedangkan 1 kriteria tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah “tingkat

pendidikan”. Masih banyak masyarakat di yang berada dibawah tingkat pendidikan yang wajar. Hal ini menyebabkan kemampuan bersaing dengan masyarakat pendatang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi menjadi tidak ada.

Berdasarkan tabel 1, tanggapan responden tentang Faktor Individu dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai baik sebanyak 21 responden (31,34%) menyatakan hal tersebut. Alasan responden menyatakan baik karena dari 3 kriteria yang ditetapkan seluruhnya terpenuhi. Masyarakat memiliki tingkat keterampilan, tingkat pendidikan yang layak dan kondisi fisik yang normal.

Berdasarkan tabel 1, tanggapan responden tentang Pengadaan Faktor Individu dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai kurang baik sebanyak 10 responden (14,93%) menyatakan hal tersebut. Alasan responden menyatakan kurang baik karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 1 yang memenuhi kriteria sedangkan 2 kriteria tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah “tingkat keterampilan dan tingkat pendidikan”. Pada umumnya, masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, menyebabkan tidak memiliki keterampilan.

2. Faktor Sosial

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor sosial. Faktor Sosial adalah faktor yang disebabkan dari lingkungan sosial dimana masyarakat itu berada. Dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, kemiskinan dapat terjadi di lingkungan masa saja. Sehubungan dengan penelitian ini, maka ditetapkan Kriterianya adalah:

- Tingkat Pendapatan keluarga
- Tingkat Ekonomi
- Kedudukan di Masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Faktor Sosial dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Faktor Sosial dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Baik	21	31,34
2.	Cukup Baik	34	50,75
3.	Kurang Baik	12	17,91
T o t a l		67	100.00

Sumber : Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 2, tanggapan responden tentang Faktor Sosial dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai cukup baik sebanyak 34 responden (50.75%) menyatakan hal tersebut. Alasan responden menyatakan cukup baik karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 2 yang memenuhi kriteria sedangkan 1 kriteria tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah “tingkat pendapatan keluarga”. Pada umumnya menyebabkan kemiskinan karena tingkat pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kebutuhan. Masyarakat di masih banyak yang memiliki penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan tabel 2, tanggapan responden tentang Faktor Sosial dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai baik sebanyak 21 responden (31.34%) menyatakan hal tersebut. Alasan responden menyatakan baik karena dari 3 kriteria yang ditetapkan seluruhnya dapat terpenuhi. Masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa Tingkat Pendapatan keluarga, Tingkat Ekonomi, Kedudukan di Masyarakat sudah dinilai wajar dan mencukupi. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan realita yang ada dimana masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

- Tingkat Pendapatan keluarga
- Tingkat Ekonomi
- Kedudukan di Masyarakat

Berdasarkan tabel 2, tanggapan responden tentang Faktor Sosial dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai kurang baik sebanyak 12 responden (17.91%) menyatakan hal tersebut. Alasan responden menyatakan cukup baik karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 2 yang memenuhi kriteria sedangkan 1 kriteria tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah “tingkat pendapatan keluarga dan tingkat ekonomi”. Tingkat perekonomian yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Jadi dengan dilakukannya perbaikan tingkat perekonomian di Indonesia, maka tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia dapat diperbaiki.

3. Faktor Kultural

Faktor Kultural adalah faktor yang disebabkan dari kebudayaan masyarakat dimana masyarakat itu berada. Sehubungan dengan faktor kultural, sebenarnya tidak ada suatu kultur yang membuktikan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Tetapi hal tersebut tidak tertutup kemungkinan kultur yang ada di masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Sehubungan dengan faktor kultural, maka dalam penelitian ini ditetapkan kriteria sebagai berikut:

- Suku.
- Kepercayaan
- Agama.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Faktor Kultural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Faktor Kultural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Baik	29	43,28
2.	Cukup Baik	23	34,33
3.	Kurang Baik	15	22,39
T o t a l		67	100.00

Sumber : Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 3, tanggapan responden tentang Faktor Kultural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai baik sebanyak 29 responden (43,28%). Hal ini memberikan alasan karena seluruh kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini terpenuhi. Tidak ada suatu pendapat yang menyatakan suku dapat menyebabkan kemiskinan, kepercayaan dapat menyebabkan kemiskinan dan

agama dapat menyebabkan kemiskinan. Maka dari itu, mayoritas responden menyebabkan faktor kultural adalah baik.

Berdasarkan tabel 3, tanggapan responden tentang Faktor Kultural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai cukup baik sebanyak 23 responden (34.33%). Hal ini memberikan alasan karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 2 kriteria yang terpenuhi dan 1 kriteria yang tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi yaitu kepercayaan. Masih banyak masyarakat di Kelurahan Pangkalan Kerinci yang mempercayai mitos. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan karena mitos yang berkembang dapat menjatuhkan semangat dalam bekerja mencari nafkah.

Berdasarkan tabel 3, tanggapan responden tentang Faktor Kultural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai kurang baik sebanyak 15 responden (22.39%). Hal ini memberikan alasan karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 1 kriteria yang terpenuhi dan 2 kriteria yang tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi yaitu suku dan kepercayaan. Sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi hal penelitian membuktikan bahwa suku yang ada di daerah ada umumnya adalah homogen. Dengan demikian, kemiskinan terjadi dirasakan oleh seluruh suku yang ada.

4. Faktor Struktural

Faktor Struktural adalah faktor yang disebabkan strukturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan faktor struktural ditetapkan kriteria penelitian yaitu:

- Kedudukan di desa
- Kedudukan di masyarakat
- Kondisi geografis

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Faktor Struktural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Faktor Struktural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Baik	21	31,34
2.	Cukup Baik	32	47,76
3.	Kurang Baik	14	20,90
T o t a l		67	100.00

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel 4, tanggapan responden tentang Faktor struktural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai cukup baik sebanyak 32 responden (47,76%). Hal ini memberikan alasan karena seluruh kriteria yang ditetapkan dalam penelitian hanya 2 yang terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah kedudukan di masyarakat. Alasan responden menyatakan demikian karena kedudukan di masyarakat tidak dapat merubah kehidupan seseorang. Kecuali kedudukan tersebut timbul karena pekerjaan yang baik. Jika kedudukan dimasyarakat akibat dari tahta atau adat istiadat, tidak tertutup kemungkinan tetap mengalami kemiskinan.

Berdasarkan tabel 4, tanggapan responden tentang Faktor struktural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai baik sebanyak 21 responden (31,34%). Hal ini memberikan alasan karena dari 3 kriteria yang ditetapkan seluruhnya dapat terpenuhi. Kedudukan di desa, kedudukan di masyarakat dan kondisi geografis dinilai dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

- Kedudukan di desa
- Kedudukan di masyarakat
- Kondisi geografis

Berdasarkan tabel 4, tanggapan responden tentang Faktor struktural dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai kurang baik sebanyak 14 responden (20,90%). Hal ini memberikan alasan karena dari 3 kriteria yang ditetapkan hanya 1 kriteria yang terpenuhi dan 2 kriteria yang tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi yaitu kondisi geografis dan kedudukan di desa. Kondisi geografis yang kurang subur, dapat menyebabkan kemiskinan. Tidak seluruh daerah di memiliki struktur tanah yang subur. Hal ini menyebabkan terjadinya kemiskinan. Sedangkan masyarakat di pada umumnya bekerja sebagai petani.

Sehubungan dengan Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir, maka dapat disajikan rekapitulasi pembahasan yaitu sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

No.	Indikator	Kriteria			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Faktor Individu	21 (31,34)	36 (53,73)	10 (14,93)	67 (100,00)
2.	Faktor Sosial	21 (31,34)	34 (50,75)	12 (17,91)	67 (100,00)
3.	Faktor Kultural	29 (43,28)	23 (34,33)	15 (22,39)	67 (100,00)
4.	Faktor Struktural	21 (31,34)	32 (47,76)	14 (23,33)	67 (100,00)
T o t a l		92	125	51	180
Rata-rata		23	31	13	67
Persentase Rata-rata		(34,33)	(46,64)	(19,03)	(100,00)

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui tanggapan responden tentang Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, adalah “cukup baik” yang ditanggapi sebanyak 31 responden (46,64%). Alasan responden menyatakan cukup baik karena pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan desa namun upaya tersebut belum optimal. Sebab masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Cukup baik didominasi pada indikator faktor individu sebesar 36 responden (53,73%). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mayoritas responden setuju bahwa faktor penyebab terbesar terjadinya kemiskinan adalah faktor individu karena kurangnya keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemudian responden yang menyatakan baik sebanyak 23 responden (34,33%) yang berarti faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat ditoleransi seluruhnya. Tanggapan baik didominasi pada indikator faktor kultural yaitu 29 responden (43,28%).

Dari tabel di atas, juga terdapat responden tentang yang menyatakan “kurang baik” sebanyak 13 responden (19,03%). Alasan responden menyatakan kurang baik karena pemerintah telah mengupayakan berbagai cara. Namun usaha tersebut tidak ada yang terealisasi secara optimal dalam memberantas kemiskinan. Tanggapan kurang baik didominasi pada indikator faktor kultural yaitu 15 responden (22,39%).

Jadi berdasarkan tabel III.9 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah cukup baik.

Hambatan yang ditemui dalam Program UPPKS di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah :

- a. Terbatasnya jumlah dana pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru secara bersamaan. Untuk mengentaskan kemiskinan secara bertahap akan menimbulkan kecemburuan Kecamatan lain yang juga terdapat desa miskin. Maka dari itu, pemerintah hanya mengupayakan secara bertahap pengentasan kemiskin di setiap daerah, dengan bantuan yang terbatas.
- b. Kurangnya penyusunan program yang harus dilaksanakan secara bertahap dari tim yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap di desa miskin. Sehingga pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan tidak terprogram.
- c. Tim yang menangani masalah pengentasan kemiskinan tidak optimal dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan. Sehingga kemiskinan yang terjadi, pengentasan hanya melalui pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa. Sedangkan pembangunan mental dan spiritual tidak dilakukan oleh tim pengentasan kemiskinan. Hal ini menyebabkan kemiskinan desa tetap terjadi meskipun telah memperoleh sarana dan prasana desa.

H. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui tanggapan responden tentang Faktor Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, adalah “cukup baik” yang ditanggapi sebanyak 31 responden (46.64%). Alasan responden menyatakan cukup baik karena pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan desa namun upaya tersebut belum optimal.
2. Kendala dalam pengentasan kemiskinan di Hambatan yang ditemui di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah :
 - a. Terbatasnya jumlah dana pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru secara bersamaan.

- b. Kurangnya penyusunan program yang harus dilaksanakan secara bertahap dari tim yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap di desa miskin.
- c. Tim yang menangani masalah pengentasan kemiskinan tidak optimal dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan.

2. Saran

1. Sebaiknya jumlah dana anggaran diperhatikan sedemikian rupa sehingga keterbatasan dana untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru dapat diatasi.
2. Sebaiknya tim menyusun program yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap di desa miskin.
3. Sebaiknya tim pengentasan kemiskinan harus optimal dalam mengentaskan kemiskinan desa baik dari segi fisik, maupun dari segi spiritual masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan fisik yang dilakukan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Curah, Jakarta.
- Bohari, 2003, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryant, Coraline dan White C. Louise, 1982, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Dror, Yehezkel, 1968, *Public Policy – Making Reexamined*, San Fransisco, Chandler Publishing Company.
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs Prentice Hall Inc.
- Grindle, Merike S., 1980, *Policy Content and Context in Implementation Princeton*, University Press New Jersey.
- Judisuseno, R. Santoso Broto Dihadjo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Lister, James P., 1980, *Public Implementation : Evaluation of the Field and Agenda of Future Research Policy Studies*, Review Autum.
- Handyaningrat, Soewarno, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung Jakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nugroho D, Riant., 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soemahamidjaya, 2006, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV. Eresco, Bandung.